

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam merumuskan penelitian ini, penelitian terdahulu dijadikan acuan untuk memahami konteks, metodologi, dan temuan yang telah ada. Sepuluh penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *deepfake*, pengalaman korban, serta dampak sosial yang dialami perempuan Gen Z di media digital, baik dari jurnal nasional maupun internasional dianalisis untuk mengidentifikasi keterbatasan dan fokus yang belum disentuh. Analisis ini menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengisi gap untuk meneliti pemaknaan perempuan Gen Z terhadap *deepfake porn*. Penelitian-penelitian tersebut akan dianalisis secara mendalam dan diklasifikasikan berdasarkan tema, fokus, metode, konsep, serta jenis penelitian yang digunakan.

Beberapa penelitian terdahulu membahas dampak penyalahgunaan *deepfake porn* terhadap korban perempuan, terutama terkait pengalaman traumatis, stigma sosial, dan perubahan perilaku di media digital. Penelitian milik Zahro (2024) menyoroti dampak negatif *deepfake* dalam konteks *post-truth*, di mana penyebaran konten manipulatif dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap individu yang menjadi korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis konten untuk mengidentifikasi bagaimana representasi visual *deepfake* memicu krisis informasi (*infopocalypse*) dan mengganggu persepsi publik. Fokus penelitian ini menekankan pada pengaruh media massa dalam memperkuat efek psikologis korban, meskipun subjek penelitian tidak terbatas pada kelompok usia tertentu. Hasil penelitian ini penting sebagai landasan untuk memahami bagaimana media digital dapat memperkuat dampak traumatis bagi korban *deepfake porn*. Meskipun memberikan pemahaman penting mengenai pengaruh struktural media digital dan pembentukan persepsi publik terhadap korban, penelitian ini belum mengkaji bagaimana korban, khususnya perempuan Generasi Z, mengelola komunikasi mereka setelah mengalami *deepfake porn*. Dimensi mengenai bagaimana korban mengambil keputusan untuk proses

membuka atau menahan informasi pribadi kepada orang terdekat, serta bagaimana mereka menetapkan batas privasi dalam situasi tersebut, belum menjadi fokus dalam penelitian ini. Oleh karena itu, masih terdapat ruang kajian untuk meneliti proses *self disclosure* korban dalam konteks pelanggaran privasi digital.

Selanjutnya, penelitian Victoria Rousay (2023) memberikan wawasan mendalam mengenai pengalaman korban *deepfake porn* dari perspektif *victim-survivor*, menyoroti dampak fisik, emosional, dan sosial yang mereka alami. Melalui wawancara mendalam dengan korban, penelitian ini mengeksplorasi pengalaman subjektif yang dialami individu ketika wajah atau tubuh mereka digunakan tanpa izin dalam konten seksual. Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari penyebaran *deepfake* mencakup trauma psikologis, rasa malu, dan potensi isolasi sosial. Penekanan pada pengalaman pribadi korban menjadi salah satu kontribusi penting penelitian ini, yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut mengenai perempuan gen z sebagai kelompok yang rentan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami pengalaman dan dampak psikologis yang dialami korban *deepfake porn*. Namun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus menelaah bagaimana korban, terutama perempuan Generasi Z, mengambil keputusan untuk membuka atau menahan informasi pribadi kepada orang terdekat setelah mengalami pelanggaran privasi. Oleh karena itu, kajian mengenai proses *self disclosure* korban dalam konteks *deepfake porn* masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Penelitian terdahulu di Indonesia juga memberikan konteks lokal terhadap fenomena *deepfake* dan Kekerasan Berbasis Gender Online atau yang biasa di singkat (Arianto, 2021). Penelitian dengan berjudul Media Sosial sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia ini menganalisis bagaimana media sosial menjadi *platform* yang memfasilitasi penyebaran konten negatif, termasuk pelecehan seksual berbasis gambar dan video. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital, terutama selama pandemi, meningkatkan kasus KBGO yang menargetkan perempuan, termasuk kelompok usia muda. Penelitian ini memberikan konteks penting mengenai bagaimana media sosial menjadi ruang terjadinya Kekerasan Berbasis Gender

Online di Indonesia. Namun, fokus penelitian masih berada pada dinamika *platform* dan dampak umum terhadap korban, serta belum secara khusus mengkaji bagaimana korban, khususnya perempuan Generasi Z, mengelola komunikasi pribadi mereka setelah mengalami pelanggaran. Dimensi mengenai proses *self disclosure* korban kepada orang terdekat dalam konteks *deepfake porn* belum menjadi perhatian dalam penelitian ini.

Selain itu, penelitian oleh Alena Birrer (2024) meninjau literatur global mengenai kondisi riset dan regulasi *deepfake*. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dalam regulasi dan perlindungan hukum yang dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Dengan pendekatan tinjauan sistematis, Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan riset dan regulasi *deepfake* secara global, serta mengidentifikasi kesenjangan dalam perlindungan hukum terhadap korban. Namun, fokus penelitian masih berada pada aspek struktural dan kebijakan, serta belum secara khusus menelaah bagaimana korban, terutama perempuan Generasi Z, mengambil keputusan untuk membuka atau menahan informasi pribadi setelah mengalami *deepfake porn*. Oleh karena itu, kajian mengenai proses *self disclosure* korban dalam konteks pelanggaran privasi digital masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Penelitian lainnya juga ada yang menekankan pada perspektif pelaku dan korban, motivasi, serta bentuk penyalahgunaan konten seksual yang tidak disetujui (Flynn et al., 2025). Penelitian ini memaparkan bagaimana pelaku menyebarkan konten *deepfake* dan bagaimana korban merespons secara psikologis dan sosial. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai interaksi sosial yang muncul akibat penyebaran *deepfake*. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang cukup baik mengenai motivasi pelaku dan respons korban terhadap penyebaran *deepfake porn*, pembahasannya masih berfokus pada dampak dan pola interaksi sosial secara umum. Penelitian tersebut belum secara mendalam mengurai bagaimana korban mengelola pengungkapan informasi pribadi dalam lingkup relasi terdekat setelah peristiwa terjadi. Dengan seperti ini, dinamika

pengambilan keputusan dalam *self disclosure* korban, khususnya pada perempuan Generasi Z, masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut.

Selain penelitian fokus korban, beberapa penelitian menekankan pada fenomena psikologis dan sosial yang muncul akibat *deepfake* (Wei et al., 2024). Penelitian ini menyoroti perilaku korban dalam mencari dukungan dan respons yang mereka terima dari komunitas digital. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai perilaku korban dalam mencari dukungan serta dinamika respons komunitas digital terhadap kasus *deepfake*. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik menelaah bagaimana korban menetapkan batas pengungkapan informasi pribadi dalam relasi terdekat setelah mengalami pelanggaran. Aspek proses *self disclosure* korban, khususnya pada perempuan Generasi Z.

Terdapat perhatian yang semakin besar terhadap isu etika dan persetujuan dalam produksi *deepfake porn*, sebagaimana dibahas oleh Benn (2025). Penelitian ini menyoroti bagaimana pembuatan konten seksual tanpa persetujuan dapat melanggar hak privasi dan moral individu. Dengan pendekatan konseptual filosofis, Benn menekankan pentingnya persetujuan eksplisit dalam penggunaan citra digital untuk tujuan seksual. Temuan penelitian ini memberikan pemahaman penting mengenai implikasi moral dan etis dari penyebaran *deepfake porn*. Penelitian ini memberikan landasan penting mengenai aspek etika dan persetujuan dalam produksi *deepfake porn*. Namun, penelitian tersebut belum menyentuh pengalaman komunikasi korban secara langsung, khususnya bagaimana perempuan Generasi Z mengelola pengungkapan informasi pribadi setelah mengalami pelanggaran privasi. Dimensi *self disclosure* korban dalam konteks relasi interpersonal masih belum menjadi fokus kajian.

Selain penelitian terdahulu yang menyoroti dampak psikologis dan sosial dari penyebaran *deepfake porn*, penelitian internasional oleh Umbach (2024) memberikan perspektif komprehensif mengenai prevalensi dan sikap masyarakat terhadap gambar intim sintetis non-konsensual di sepuluh negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei lintas negara yang melibatkan lebih dari 16.000 responden, sehingga mampu memberikan gambaran yang luas mengenai victimisasi dan perilaku perpelanggaran terkait *deepfake porn*. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa sekitar 2,2% responden mengalami victimisasi, sementara 1,8% terlibat sebagai pelaku, menekankan bahwa meskipun kesadaran publik meningkat, perlindungan hukum dan regulasi yang ada masih belum memadai untuk mencegah penyalahgunaan teknologi ini. Penelitian ini memberikan gambaran luas mengenai tingkat victimisasi dan sikap masyarakat terhadap *deepfake porn* di berbagai negara. Namun, pendekatan kuantitatif yang digunakan lebih menekankan pada prevalensi dan pola umum, sehingga belum menggali secara mendalam dinamika komunikasi korban setelah mengalami pelanggaran. Aspek proses *self disclosure* korban, khususnya pada perempuan Generasi Z dalam konteks relasi interpersonal, belum menjadi fokus dalam penelitian tersebut.

Sebagai kelanjutan studi terkait *deepfake porn*, penelitian Di Silvestro dan Iurissevich (2024) menyoroti penggunaan teknologi *deepfake* dalam pornografi sebagai bentuk kekerasan digital. Penelitian ini mengkaji bagaimana alat seperti “*nudifier*” memungkinkan pembuatan konten seksual non-konsensual, serta dampaknya terhadap individu, terutama perempuan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi pengalaman korban melalui studi kasus dan wawancara mendalam, menekankan risiko psikologis, sosial, dan etis yang ditimbulkan oleh penyebaran konten *deepfake*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan alat ini menciptakan tekanan emosional, rasa malu, dan potensi isolasi sosial bagi korban, serta menegaskan perlunya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak teknologi digital terhadap kehidupan personal dan sosial individu.

Salah satu penelitian terdahulu menyoroti implikasi sosial, hukum, dan etika dari pornografi *deepfake* yang tersebar di *platform* digital, sebagaimana dibahas oleh Furizal (2025). Melalui *systematic literature review* menggunakan *PICOS framework* dan *PRISMA methodology*, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana konten seksual non-konsensual memengaruhi korban, terutama perempuan dan kelompok rentan, serta menekankan peran *platform* digital dalam moderasi dan pengawasan konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan regulasi dan lemahnya penegakan hukum meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan kerugian psikologis bagi korban. Penelitian ini memberikan pemahaman penting mengenai

kerangka hukum dan etis terkait penyebaran *deepfake porn*, sekaligus menjadi landasan bagi penelitian ini untuk mengeksplorasi pengalaman dan pemaknaan perempuan Gen-Z terhadap fenomena *deepfake porn* dalam konteks digital sehari-hari. Namun, penelitian tersebut belum menyoroti pengalaman komunikasi korban secara langsung, khususnya bagaimana perempuan Generasi Z memaknai pengalaman *deepfake porn* dan mengelola *self disclosure* terhadap orang terdekat. Dimensi pengambilan keputusan korban dalam membuka atau menahan informasi pribadi di ruang digital sehari-hari masih relatif belum menjadi fokus kajian.

O'Callaghan et al. (2021) meneliti bagaimana pengungkapan pengalaman kekerasan seksual memengaruhi hubungan korban dengan orang-orang yang mereka ceritakan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus *dyadic*, melibatkan 45 pasangan *survivor* dan *support provider*, termasuk teman, keluarga, dan pasangan, melalui wawancara semi-terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan (91%) melaporkan perubahan dalam hubungan setelah korban melakukan *self disclosure*, mencerminkan bahwa proses pengungkapan pengalaman trauma tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga memengaruhi dinamika dukungan sosial dan kepercayaan dalam relasi interpersonal. Temuan ini menekankan bahwa *self disclosure* merupakan proses yang kompleks, melibatkan pertimbangan risiko, keamanan emosional, serta ekspektasi terhadap pihak yang menjadi penerima informasi. Namun, penelitian tersebut belum menyoroti pengalaman korban *deepfake porn*, khususnya perempuan Generasi Z, serta bagaimana mereka memaknai pengalaman pelanggaran privasi digital dan mengelola keputusan *self disclosure* di ruang digital. Dimensi komunikasi korban dalam konteks teknologi digital masih relatif belum menjadi fokus kajian.

Lalu yang terakhir Catton et al. (2023) meneliti bagaimana respons sosial terhadap pengungkapan kekerasan seksual memengaruhi keputusan korban untuk melakukan *re-disclosure*. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif eksperimen berbasis skenario, melalui survei daring, untuk mengevaluasi pengaruh respons validatif dan tidak validatif terhadap keputusan korban membuka diri kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons tidak validatif

meningkatkan rasa malu dan secara signifikan menurunkan kemungkinan korban melakukan *re-disclosure*, sedangkan respons yang mendukung justru meningkatkan kemungkinan korban membuka diri kembali. Temuan ini menegaskan bahwa pengalaman sosial setelah *disclosure* pertama sangat memengaruhi cara korban mengelola informasi pribadinya di masa depan. Namun, penelitian tersebut belum menyoroti konteks kekerasan berbasis teknologi digital, seperti *deepfake porn*, maupun pengalaman perempuan Generasi Z dalam memaknai pengalaman pelanggaran privasi digital dan mengelola proses *self disclosure* di ruang digital. Dimensi komunikasi korban dalam konteks media sosial masih relatif belum menjadi fokus kajian.

Berdasarkan analisis dua belas penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut telah memberikan wawasan penting mengenai dampak maupun penyalahgunaan *deepfake* terhadap perempuan, terutama terkait trauma psikologis, stigma sosial, respons sosial, dan dinamika interaksi di media digital. Beberapa studi menyoroti pengalaman subjektif korban, implikasi etis dan hukum, serta strategi pengungkapan informasi pribadi dalam konteks kekerasan seksual umum (Rousay, 2023; Birrer, 2024; Catton et al., 2023). Namun, tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada penelitian yang secara khusus menyoroti pemaknaan perempuan Generasi Z terhadap pengalaman mereka menghadapi *deepfake porn* dan proses mereka untuk melakukan *self disclosure* ke orang terdekat terutama dalam konteks Indonesia. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada perspektif pelaku, regulasi, atau dampak umum, dan belum mengkaji secara mendalam bagaimana perempuan Gen-Z memahami, menafsirkan, dan mengelola pengalaman psikologis, sosial, serta proses *self disclosure* mereka di lingkungan terdekat mereka setelah mengalami pelanggaran privasi akibat *deepfake porn*. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada perempuan Gen-Z di Indonesia, kelompok yang sangat aktif di media digital dan rentan terhadap penyebaran konten *deepfake*, serta menekankan pemaknaan subjektif dan pengalaman sosial digital mereka. Penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi perlindungan yang lebih tepat bagi korban *deepfake porn* di Indonesia.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	(Zahro' et al., 2024)	(Rousay, 2023)	(Flynn et al., 2025)	(Birrer & Just, 2024)	(Benn, 2025)	(O'Callaghan et al., 2021)
Judul Artikel	Dampak Penyalahgunaan <i>Deepfake</i> dalam Memanipulasi Visual: Menguak Potensi Infopocalypse di Era Post Truth Terhadap Asumsi Masyarakat pada Media Massa	<i>Sexual Deepfakes and Image-Based Sexual Abuse: Victim-Survivor Experiences and Embodied Harms</i>	<i>Sexualized Deepfake Abuse: Perpetrator and Victim Perspectives on the Motivations and Forms of Non-Consensually Created and Shared Sexualized Deepfake Imagery</i>	<i>What we know and don't know about deepfakes: An investigation into the state of the research and regulatory landscape</i>	<i>Deepfakes, Pornography and Consent.</i>	<i>A Dyadic Study of Impacts of Sexual Assault Disclosure on Survivors' Informal Support Relationships</i>
Tujuan	Meneliti bagaimana penyalahgunaan teknologi <i>deepfake</i> dalam menciptakan visualisasi hoaks memengaruhi perubahan asumsi masyarakat dan potensi terjadinya infopocalypse di era <i>post-truth</i> .	Meneliti pengalaman korban dan dampak fisik, emosional, dan sosial dari penyalahgunaan gambar berbasis seksual, khususnya <i>deepfake porn</i>	Meneliti perspektif korban dan pelaku mengenai motivasi dan bentuk penyalahgunaan <i>deepfake porn</i> yang dibuat dan dibagikan tanpa persetujuan.	Menyajikan tinjauan sistematis terhadap penelitian empiris tentang <i>deepfakes</i> dan menilai respons regulasi global terhadap fenomena ini.	Meneliti aspek etika dan persetujuan dalam pembuatan <i>deepfake</i> pornografi, khususnya dampak terhadap hak individu yang digambarkan.	Mengetahui bagaimana pengungkapan pengalaman kekerasan seksual memengaruhi hubungan antara korban dan orang-orang yang mereka ceritakan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Konsep	<i>Deepfake, Post-Truth, Infopocalypse</i>	<i>Image Based Abuse, Techno Feminism, Deepfake porn</i>	<i>Sexualized Deepfake Abuse, Non-consensual creation and distribution, Perpetrator minimization and justification</i>	<i>Image-Based Abuse, Regulation and Policy, Deep fakes</i>	<i>Consent, Privacy, Deepfake Pornography</i>	<i>Sexual assault disclosure, informal support relationships, social support</i>
Jenis Penelitian: Metode: Teknik Pengumpulan Data:	Penelitian Kualitatif, Analisis Konten dan Fenomenologi, Observasi dan Wawancara,	Penelitian Kualitatif, Fenomenologi Interpretatif Wawancara semi-terstruktur	Penelitian Kualitatif, Studi Kasus, Wawancara mendalam dengan 25 partisipan (10 pelaku dan 15 korban) di Australia	Penelitian Kualitatif, Tinjauan sistematis dan analisis konten Analisis literatur dan dokumen kebijakan terkait <i>deepfakes</i>	Analisis konseptual filosofis; studi teoretis tanpa pengumpulan data empiris.	Penelitian kualitatif, studi kasus <i>dyadic (survivor + support provider)</i> , wawancara semi-terstruktur dengan 45 pasangan survivor dan pendukung informal (teman, keluarga, pasangan)
Hasil dan Kesimpulan	Hasil penelitian ini menemukan bahwa semakin rendah pemahaman masyarakat terhadap teknologi <i>deepfake</i> , semakin besar kemungkinan mereka menerima informasi palsu, sehingga meningkatkan potensi kebingungan dan infopocalypse.	Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa <i>Deepfake</i> menimbulkan dampak fisik, emosional, dan sosial yang mendalam bagi korban, namun masih sedikit dukungan atau pengakuan terhadap pengalaman mereka.	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaku <i>deepfake porn</i> termotivasi oleh dominasi atau balas dendam, sementara korban mengalami stres, kecemasan, dan kerusakan reputasi. Studi ini menekankan perlunya pendekatan hukum dan sosial yang lebih efektif.	Penelitian ini menemukan bahwa meskipun perhatian terhadap <i>deepfakes</i> meningkat, pemahaman ilmiah dan respons regulasi masih terbatas. Banyak kekhawatiran yang muncul lebih didasarkan pada alarmisme daripada bukti yang kuat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan <i>deepfake porn</i> tanpa persetujuan melanggar hak privasi dan moral individu, menegaskan pentingnya persetujuan eksplisit sebagai syarat etis produksi konten seksual digital.	Sebagian besar pasangan (91%) melaporkan bahwa hubungan mereka berubah setelah korban membuka diri.

Nama Peneliti	(Di Silvestro & Iurissevich, 2024)	(Wei et al., 2024)	(Umbach et al., 2024)	(Furizal et al., 2025)	(Arianto, 2021)	(Catton et al., 2023)
Judul Artikel	<i>Contemporary pornography: deepfake as a form of abuse</i>	<i>Understanding Help-Seeking and Help-Giving on Social Media for Image-Based Sexual Abuse</i>	<i>Non-Consensual Synthetic Intimate Imagery: Prevalence and Attitudes Across Ten Countries</i>	<i>Social, legal, and ethical implications of AI-Generated deepfake pornography on digital platforms: A systematic literature review</i>	Media Sosial sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia	<i>Disclosure of Sexual Victimization: Effects of Invalidation and Shame on Re-Disclosure</i>
Tujuan	Meneliti bagaimana <i>deepfake</i> pornografi digunakan sebagai bentuk kekerasan digital non-konsensual dan dampaknya terhadap individu, terutama perempuan.	Mengeksplorasi bagaimana individu mencari dan menerima bantuan terkait pelecehan seksual berbasis gambar (IBSA) melalui media sosial, dengan fokus pada komunitas Reddit.	Mengeksplorasi prevalensi, sikap, dan pengetahuan masyarakat terkait gambar intim sintetis non-konsensual (NSII) di 10 negara.	Meneliti implikasi sosial, hukum, dan etika dari pornografi <i>deepfake</i> yang tersebar melalui platform digital, termasuk isu privasi, eksploitasi seksual, serta tanggapan regulasi di tingkat global.	Mengelaborasi fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia, khususnya selama pandemi COVID-19, serta mengidentifikasi faktor penyebab dan langkah-langkah pencegahannya.	Meneliti bagaimana respons tidak validatif (invalidation) dan rasa malu (shame) memengaruhi keputusan korban kekerasan seksual untuk kembali membuka diri (re-disclosure) setelah pengungkapan pertama.
Konsep	<i>Non-Consensual Intimate Imagery (NCII), Digital Abuse, Ethics</i>	<i>Image-Based Sexual Abuse (IBSA), Help-Seeking Behavior, Help-Giving Behavior, Sociotechnical Systems</i>	<i>Non-Consensual Synthetic Intimate Imagery (NSII), Deepfake Pornography, Platform Policy Enforcement</i>	<i>Deepfake pornography, privacy violations, consent, legal frameworks, ethical impacts, platform governance</i>	Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), Literasi Digital, Patriarki	<i>Sexual victimization disclosure, re-disclosure, invalidation, shame, social reactions.</i>
Jenis Penelitian: Metode: Teknik Pengumpulan Data:	Penelitian kualitatif empiris, menggunakan wawancara naratif dan analisis kasus <i>deepfake</i> .	Penelitian Kualitatif, Analisis konten, Pemilihan 261 pos relevan dari Reddit	Kuantitatif, Survei Online, Pengumpulan data dari lebih dari 16.000 responden di 10 negara melalui survei online.	<i>Systematic Literature Review (SLR) menggunakan PICOS framework dan PRISMA methodology untuk menyeleksi dan mengevaluasi publikasi terkait deepfake porn.</i>	Kualitatif, Eksplanatoris, <i>in depth interview</i>	Penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen berbasis skenario, menggunakan survei daring untuk menguji pengaruh respons validatif dan tidak validatif terhadap keputusan re-disclosure.
Hasil dan Kesimpulan	Hasil menunjukkan penggunaan <i>deepfake</i> pornografi sebagai alat abuse berdampak negatif pada privasi dan kesejahteraan korban, menekankan kebutuhan perlindungan hukum dan mekanisme pencegahan yang lebih kuat.	Penelitian ini menemukan bahwa individu yang mengalami IBSA sering mencari bantuan di Reddit untuk mendapatkan dukungan teknis, emosional, dan hubungan. Komunitas memberikan respons yang umumnya mendukung, namun terkadang kurang nuansa. Temuan ini menyoroti kesenjangan sosioteknis dalam menghubungkan korban dengan dukungan yang tepat.	Kesadaran terhadap NSII rendah, tapi mayoritas menganggap <i>deepfake</i> pornografi merugikan. Prevalensi korban tercatat 2,2%, pelaku 1,8%. Legislasi ada tapi belum efektif. Pencegahan disarankan melalui literasi digital dan kebijakan <i>platform</i> yang lebih baik.	Penelitian menunjukkan bahwa <i>deepfake</i> porn berdampak psikologis, sosial, dan profesional bagi korban, terutama perempuan. Kekosongan regulasi dan moderasi <i>platform</i> memperparah risiko, sehingga penelitian merekomendasikan reformasi hukum, tanggung jawab <i>platform</i> , dan teknologi deteksi untuk media sintetis.	Pandemi mempercepat transformasi digital yang meningkatkan KBGO; literasi digital rendah dan peluang <i>platform</i> terbuka menjadi faktor utama. Pencegahan disarankan melalui literasi digital, komunitas berjejaring, keterlibatan laki-laki, dan regulasi pemerintah.	respons yang tidak validatif meningkatkan rasa malu dan secara signifikan menurunkan kemungkinan korban untuk kembali membuka diri. Sebaliknya, respons yang mendukung meningkatkan kemungkinan re-disclosure. Temuan ini menegaskan bahwa pengalaman sosial setelah disclosure sangat memengaruhi keputusan korban dalam mengelola keterbukaan informasi pribadinya di masa depan.

2.2 Communication Privacy Management Theory

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah *Communication Privacy Management Theory* (CPM) yang dikembangkan oleh Sandra Petronio. Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan bagaimana individu mengelola informasi pribadinya ketika mengalami pelanggaran privasi, khususnya dalam bentuk kekerasan berbasis gender online seperti *deepfake*. Kasus *deepfake* merupakan bentuk pelanggaran privasi yang kompleks karena melibatkan manipulasi identitas digital dan penyebaran konten tanpa persetujuan korban. Dalam situasi tersebut, korban tidak hanya mengalami dampak psikologis dan sosial, tetapi juga menghadapi dilema terkait keputusan untuk membuka atau menutup informasi tentang pengalaman yang dialaminya. Oleh karena itu, penelitian ini memandang *self disclosure* bukan sekadar tindakan membuka diri, melainkan sebagai bagian dari proses pengelolaan batas privasi setelah terjadi pelanggaran. Melalui perspektif CPM, penelitian ini berupaya memahami bagaimana korban *deepfake* menetapkan batasan privasi, kepada siapa mereka memilih untuk mengungkapkan pengalaman tersebut, serta bagaimana mereka menegosiasikan kontrol atas informasi pribadi yang telah terlanjur tersebar. Dengan demikian, teori CPM memberikan kerangka kuat untuk menganalisis *self disclosure* korban dalam konteks pelanggaran privasi digital.

Pengungkapan informasi pribadi merupakan salah satu aspek penting dalam interaksi sosial, di mana individu memiliki kontrol terbatas terhadap siapa yang mengakses informasi tersebut (Petronio, 2002, dalam Griffin, 2012, p. 168). Dalam konteks komunikasi interpersonal, konsep pengungkapan diri atau *self disclosure* telah lama dikaji melalui *social penetration theory* yang dikembangkan oleh Altman dan Taylor (1973, dalam Griffin, 2012, p. 168). Teori ini menekankan bahwa *self disclosure* merupakan mekanisme utama untuk membangun kedekatan interpersonal dan memperkuat hubungan antara individu. Melalui pengungkapan bertahap, seseorang dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan intimasi dengan pihak lain, sehingga hubungan interpersonal menjadi lebih erat.

Meskipun demikian, Altman (1973, dalam Griffin, 2012, p. 168) menegaskan bahwa pengungkapan diri tidak selalu mencerminkan keseluruhan

informasi yang dimiliki individu, melainkan hanya sebagian sisi dari identitas pribadi. Hal ini menunjukkan adanya dimensi privasi yang melekat pada setiap tindakan pengungkapan, di mana individu secara aktif menilai batas informasi yang layak dibagikan dan yang perlu dilindungi. Oleh karena itu, pengungkapan diri tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang kontrol dan keamanan informasi pribadi, terlebih dalam konteks digital di mana risiko penyebaran informasi tanpa izin menjadi sangat tinggi, seperti halnya penyebaran konten *deepfake porn*.

Penelitian mengenai manajemen privasi komunikasi, Petronio (2002, dalam Griffin, 2012, p. 168) mengembangkan *Communication Privacy Management (CPM) Theory*, yang memperluas konsep *self disclosure* dengan menekankan pengelolaan batas privasi (*privacy boundaries*) sebagai pusat dari interaksi sosial. Berbeda dengan istilah *self disclosure* yang sering dikaitkan secara eksklusif dengan keintiman interpersonal, CPM menekankan *disclosure of private information* atau pengungkapan informasi pribadi secara lebih luas, yang dapat dilakukan dengan berbagai tujuan, termasuk mencari dukungan, mengurangi beban emosional, atau sekadar mengekspresikan diri (Petronio, 2002, dalam Griffin, 2012, p. 169). Dengan hal ini, pengungkapan informasi tidak hanya mencerminkan kedekatan interpersonal tetapi juga merupakan strategi individu dalam menavigasi risiko dan keuntungan terkait privasi. Konsep batas privasi dalam CPM digambarkan sebagai garis pemisah antara informasi pribadi yang diketahui oleh individu dan informasi yang dapat diakses oleh orang lain. Batas ini dapat berupa filter tipis yang memungkinkan informasi tertentu dibagikan, maupun penghalang tebal yang dirancang untuk melindungi rahasia terdalam individu (Petronio, 2002, dalam Griffin, 2012, p. 168). Setiap kali individu memutuskan untuk berbagi sebagian informasi pribadi, mereka secara tidak langsung mengubah bentuk batas privasi tersebut dan menandai adanya potensi risiko terhadap penyebaran informasi. Hal ini sangat relevan dalam konteks perempuan Gen-Z yang mengalami penyebaran *deepfake porn* di media sosial, di mana pengungkapan informasi pribadi tidak hanya terkait dengan relasi interpersonal, tetapi juga terkait dengan perlindungan diri dan keamanan digital.

Petronio (2002, dalam Griffin, 2012, p. 169) menekankan bahwa istilah *disclosure of private information* lebih netral dibanding *self disclosure* karena fokus CPM tidak hanya pada tindakan pengungkapan, tetapi juga pada isi informasi dan bagaimana penerima informasi mengelolanya. Konsep ini menjadi penting dalam konteks penelitian ini karena pengalaman korban *deepfake porn* sering kali melibatkan pengungkapan yang tidak disengaja atau dipaksakan, sehingga manajemen batas privasi dan pemahaman terhadap risiko menjadi sangat krusial. Dengan kata lain, CPM memberikan kerangka teoretis untuk memahami bagaimana perempuan Gen-Z menavigasi situasi yang kompleks antara kebutuhan untuk berbagi informasi, mencari dukungan, dan menjaga privasi mereka di media sosial.

Dalam kerangka CPM, Petronio (2002, dalam Griffin, 2012, p. 169–176) menjelaskan bahwa pengelolaan informasi pribadi tidak hanya berhenti pada tindakan pengungkapan, tetapi juga melibatkan aturan, kontrol, dan tanggung jawab yang kompleks. Teori ini kemudian dirinci melalui lima prinsip utama yang membimbing individu dalam menavigasi batas privasi mereka.

- i. Prinsip pertama menekankan bahwa setiap individu percaya bahwa mereka memiliki dan berhak mengontrol informasi pribadi mereka. Dalam konteks perempuan Gen-Z yang menghadapi penyebaran *deepfake porn*, prinsip ini menjadi relevan karena korban seringkali berada dalam posisi di mana mereka harus menilai sejauh mana mereka masih mengendalikan informasi tentang diri mereka sendiri di ranah digital. Kesadaran atas kepemilikan informasi ini mempengaruhi keputusan untuk berbagi, menyembunyikan, atau membatasi informasi, sekaligus memberikan motivasi untuk menetapkan batas privasi yang jelas.
- ii. Prinsip kedua menyatakan bahwa individu menerapkan aturan privasi personal untuk mengontrol informasi mereka. Aturan ini bersifat subjektif dan fleksibel, bergantung pada preferensi pribadi, pengalaman sebelumnya, dan penilaian risiko. Dalam praktiknya, perempuan Gen-Z mungkin menetapkan aturan khusus terkait siapa yang dapat

menerima informasi sensitif, kapan pengungkapan boleh dilakukan, serta melalui *platform* apa informasi tersebut dibagikan.

- iii. Prinsip ketiga menunjukkan bahwa ketika informasi pribadi dibagikan dengan pihak lain, penerima informasi tersebut menjadi *co-owner* atau pemilik bersama informasi. Hal ini berarti bahwa penerima memiliki tanggung jawab terkait pengelolaan informasi yang diterima. Dalam situasi penyebaran *deepfake porn*, *co-ownership* ini menjadi krusial karena siapa pun yang mengetahui informasi sensitif berpotensi memengaruhi kontrol korban atas penyebaran informasi tersebut. Kesadaran terhadap *co-ownership* memaksa individu untuk menilai dengan hati-hati kepada siapa mereka mempercayakan informasi pribadi mereka.
- iv. Prinsip keempat mengharuskan adanya negosiasi aturan privasi bersama antara pemilik informasi dan *co-owner*. Negosiasi ini bertujuan menyelaraskan batas privasi sehingga risiko penyebaran yang tidak diinginkan dapat diminimalkan. Pada konteks penelitian ini, perempuan Gen-Z yang menjadi korban *deepfake porn* perlu melakukan penyesuaian interaksi dengan orang-orang terdekat, seperti teman, pasangan, atau keluarga, untuk memastikan batasan informasi mereka dipahami dan dihormati. Negosiasi ini menjadi bagian dari strategi manajemen risiko yang kompleks dalam menjaga privasi dan keamanan digital.
- v. Prinsip kelima, yaitu *boundary turbulence*, muncul ketika negosiasi atau aturan bersama gagal dijalankan. Turbulensi batas ini dapat memunculkan konflik, kebingungan, atau hilangnya kepercayaan antara individu yang berbagi informasi dan penerima. Dalam kasus korban *deepfake porn*, *boundary turbulence* dapat terjadi ketika informasi sensitif tersebar tanpa izin, mengakibatkan gangguan psikologis, tekanan sosial, dan rasa ketidakamanan yang meningkat. Prinsip ini menekankan pentingnya manajemen yang hati-hati dan

pemahaman menyeluruh terhadap aturan privasi, terutama dalam konteks interaksi digital yang mudah tersebar dan sulit dikendalikan.

Selain prinsip-prinsip utama, Petronio (2002, dalam Griffin, 2012, p. 170–171) juga menekankan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keputusan individu dalam mengungkapkan informasi pribadi, yang secara langsung berdampak pada efektivitas pengelolaan batas privasi.

- i. Faktor pertama adalah budaya, yang membentuk norma dan nilai terkait keterbukaan informasi. Budaya menentukan sejauh mana individu merasa nyaman membagi informasi pribadi dan kepada siapa mereka mau membagikannya. Penelitian menunjukkan bahwa norma budaya yang menekankan kepatuhan, loyalitas keluarga, dan tabu terhadap pembahasan isu sensitif, seperti seksualitas, cenderung membuat individu lebih berhati-hati dalam melakukan *disclosure* (Kenny & McEachern, 2000, dalam Griffin, 2012, p. 171). Dalam konteks perempuan Gen-Z di Indonesia, budaya lokal yang masih konservatif dapat memengaruhi cara mereka menilai risiko dan memilih untuk membatasi informasi tentang pengalaman mereka menghadapi *deepfake porn*.
- ii. Faktor kedua adalah gender, yang memengaruhi siapa yang lebih mudah menerima dan memberikan *disclosure*. Secara konsisten, penelitian menunjukkan bahwa individu, baik laki-laki maupun perempuan, lebih cenderung mengungkapkan informasi pribadi kepada perempuan dibandingkan laki-laki (Dindia & Allen, 1992; Griffin, 2012, p. 171). Hal ini menunjukkan pentingnya peran gender dalam membangun kepercayaan dan memitigasi risiko penyebaran informasi. Dalam kasus perempuan Gen-Z korban *deepfake porn*, gender dapat menjadi faktor penting dalam menentukan kepada siapa mereka merasa aman untuk membuka diri, misalnya memilih teman perempuan dekat atau anggota keluarga yang dipercaya.
- iii. Faktor ketiga adalah motivasi interpersonal, seperti ketertarikan, rasa suka, dan kedekatan emosional dengan orang lain. Petronio (2002,

dalam Griffin, 2012, p. 171) menekankan bahwa individu yang memiliki hubungan baik atau merasa tertarik secara emosional cenderung lebih terbuka dalam berbagi informasi pribadi. Dalam penelitian ini, motivasi interpersonal dapat memengaruhi keputusan korban untuk berbagi pengalaman mereka di media sosial atau dalam lingkaran sosial terbatas, baik untuk mencari dukungan, meringankan beban emosional, maupun untuk membangun solidaritas dengan orang-orang terdekat.

- iv. Faktor keempat adalah konteks situasional, termasuk kondisi psikologis dan peristiwa traumatis. Peristiwa traumatis, seperti pengalaman menjadi korban penyebaran *deepfake porn*, dapat mengubah aturan privasi secara sementara atau permanen. Individu cenderung menutup diri untuk sementara waktu dan menciptakan batas privasi yang lebih tebal, sehingga informasi pribadi menjadi lebih sulit diakses oleh orang lain (Petronio, 2002, dalam Griffin, 2012, p. 171). Pemahaman konteks ini penting untuk menilai bagaimana perempuan Gen-Z menavigasi ruang digital yang kompleks dan rentan terhadap penyebaran informasi.
- v. Faktor terakhir adalah rasio risiko manfaat, yaitu pertimbangan individu sebelum memutuskan untuk mengungkapkan atau menyembunyikan informasi. Manfaat pengungkapan dapat mencakup dukungan sosial, pengurangan stres, atau penguatan hubungan, sementara risiko meliputi rasa malu, penolakan, hilangnya kendali, atau bocornya informasi ke pihak yang tidak diinginkan (Petronio, 2002, dalam Griffin, 2012, p.171). Dalam kasus korban *deepfake porn*, pertimbangan ini menjadi sangat kritis karena risiko penyebaran informasi pribadi dapat memengaruhi reputasi, keamanan, dan kesejahteraan psikologis mereka.

Dengan memahami faktor-faktor ini, CPM memberikan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis hubungan antara pengungkapan informasi dan interaksi sosial. *Disclosure* tidak hanya menciptakan kedekatan interpersonal, tetapi

juga membentuk batas privasi kolektif antara individu dan *co-owner* informasi mereka. Ketika aturan bersama gagal diikuti, terjadi turbulensi batas yang dapat merusak kepercayaan, menimbulkan konflik, dan memengaruhi dinamika hubungan (Petronio, 2002, dalam Griffin, 2012, p. 176).

Setelah individu membentuk aturan privasi berdasarkan berbagai kriteria, seperti budaya, gender, motivasi, konteks, dan pertimbangan risiko-manfaat, aturan tersebut kemudian diterapkan melalui proses koordinasi batas privasi (*boundary coordination*). Petronio (2002 p. 83) dalam buku *Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclosure* menjelaskan bahwa informasi pribadi dikelilingi oleh *privacy boundaries* yang berfungsi sebagai batas antara informasi yang bersifat privat dan informasi yang dapat diakses oleh pihak lain. Batas privasi ini membantu individu mengelola akses terhadap informasi pribadi sekaligus mempertahankan kontrol atas kepemilikan informasi tersebut. Ketika seseorang memutuskan untuk mengungkapkan informasi pribadi kepada orang lain, batas privasi tidak hilang, tetapi mengalami penyesuaian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses koordinasi tersebut, Petronio (2002 p. 99) memperkenalkan konsep *boundary permeability*, yaitu tingkat keterbukaan atau ketertutupan suatu batas privasi. Permeabilitas batas menunjukkan seberapa mudah informasi pribadi dapat melintasi batas tersebut dan diakses oleh pihak lain. Batas yang sangat permeabel memungkinkan informasi mengalir kepada lebih banyak orang, sedangkan batas yang kurang permeabel membatasi akses hanya kepada individu tertentu yang dipercaya. Tingkat permeabilitas ini tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah sesuai dengan aturan privasi yang dibangun individu dan kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, perbedaan tingkat keterbukaan seseorang dalam mengungkapkan pengalaman pribadi dapat dipahami sebagai hasil dari pengelolaan permeabilitas batas privasi yang berbeda-beda.

Dalam penelitian ini, perempuan Gen-Z menghadapi dilema antara kebutuhan untuk berbagi pengalaman dan menjaga privasi di ruang digital yang sangat publik. CPM memungkinkan penelitian ini untuk memahami bagaimana pengungkapan informasi pribadi bersifat strategis dan kontekstual, bukan sekadar tindakan membangun kedekatan. Teori ini menekankan bahwa pengungkapan

informasi juga berfungsi untuk mengatur privasi, melindungi diri, dan mengelola risiko, sehingga relevan untuk menganalisis pengalaman perempuan Gen-Z yang menjadi korban penyebaran *deepfake porn*. Pendekatan ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mengeksplorasi keputusan *disclosure* mereka kepada orang yang mereka pilih, faktor-faktor yang memengaruhinya, sedalam apa mereka bercerita dan dampak sosial serta psikologis dari pengelolaan informasi pribadi di ranah digital.

2.3 Landasan Konsep

2.2.1 Deepfake Porn

Pembahasan mengenai *deepfake pornography* harus dimulai dengan memahami teknologi dasarnya yang dikenal sebagai *deepfake*. Secara sederhana, istilah *deepfake* merupakan gabungan dari konsep *deep learning* atau pembelajaran mesin yang mendalam, dan *fake* yang berarti palsu. Teknologi ini pada dasarnya adalah bagian dari *artificial intelligence* yang mampu menciptakan atau mengubah konten digital seperti foto, video, dan suara agar terlihat sangat mirip dengan aslinya. Gaur (2022, p.12) menjelaskan bahwa kecanggihan teknologi ini terletak pada kemampuannya mengenali ciri fisik manusia secara mendalam, seperti detail wajah, gerak-gerik, hingga warna suara, untuk kemudian dipindahkan ke subjek lain dengan sangat rapih. Berbeda dengan teknik pengeditan video biasa yang cenderung kaku, *deepfake* bekerja secara otomatis dengan mempelajari ribuan data visual, sehingga hasil manipulasinya seringkali tidak bisa dibedakan oleh mata manusia biasa. Pada awalnya, teknologi ini dilihat sebagai sebuah inovasi digital, namun fungsinya berubah menjadi ancaman nyata ketika digunakan untuk merekayasa identitas seseorang tanpa izin (Gaur, 2022).

Loveleen Gaur (2022) mengidentifikasi secara rinci beberapa jenis *deepfake* yang paling sering ditemukan dan dampaknya:

1. *Deepfake Video*: Jenis ini merupakan yang paling populer, di mana teknologi AI digunakan untuk mengganti wajah seseorang dalam sebuah video dengan wajah orang lain secara sangat rapi. Melalui proses pemetaan digital, ekspresi

dan gerakan wajah asli dapat diikuti oleh wajah buatan tersebut, sehingga menciptakan rekaman visual yang terlihat sangat menyatu dan sulit dibedakan.

2. *Deepfake* Audio: Jenis ini juga sering disebut sebagai *voice cloning* atau pengkloningan suara. Teknologi ini bekerja dengan cara mempelajari sampel suara seseorang dalam durasi singkat, lalu AI akan meniru nada, intonasi, hingga gaya bicara orang tersebut. Hasilnya adalah rekaman suara baru yang terdengar sangat identik dengan suara asli individu yang ditiru.
3. *Deepfake* Gambar: Jenis ini berfokus pada manipulasi foto atau gambar diam. Teknik ini sering disebut sebagai *morphing*, di mana AI mengubah atau menggabungkan elemen visual pada sebuah foto sehingga subjek di dalamnya terlihat berada dalam situasi, posisi, atau pakaian yang berbeda dari aslinya, namun tetap mempertahankan kemiripan wajah yang sangat akurat.

Ketiga jenis teknologi di atas pada dasarnya merupakan inovasi digital yang bisa digunakan untuk tujuan kreatif maupun hiburan. Namun, batasan antara inovasi dan kejahatan menjadi sangat tipis ketika teknologi ini jatuh ke tangan yang salah. Kenyataannya, potensi besar dari manipulasi video, suara, dan gambar tersebut justru lebih banyak diarahkan untuk merusak reputasi dan melanggar hak privasi orang lain. Penyalahgunaan yang paling berbahaya dan paling banyak ditemukan dari teknologi ini adalah *deepfake porn* yang masuk kedalam jenis *deepfake* gambar maupun *deepfake* video. Jika dilihat dari sejarahnya, Nina Schick (2020) dari salah satu bukunya mengungkapkan sebuah fakta penting bahwa teknologi *deepfake* sebenarnya tidak lahir dari laboratorium penelitian untuk tujuan kebaikan, melainkan muncul pertama kali di forum internet pada akhir tahun 2017 sebagai alat untuk menciptakan video porno tanpa izin.

Dalam perkembangannya, *deepfake pornography* didefinisikan sebagai tindakan mengambil wajah asli seseorang melalui bantuan AI, lalu menempelkannya ke dalam konten seksual yang dilakukan oleh orang lain. Artinya, korban sebenarnya tidak pernah melakukan tindakan seksual tersebut, namun secara visual mereka terlihat seolah-olah melakukannya dengan sangat

nyata. Schick (2020) juga memaparkan data yang sangat mengkhawatirkan bahwa sekitar 96 persen dari seluruh konten *deepfake* yang tersebar di internet adalah pornografi dan hampir seluruh korbannya adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal kemunculannya, teknologi ini memang sudah diarahkan untuk menyerang martabat dan kedaulatan tubuh perempuan di dunia digital.

Berdasarkan klasifikasi dari Gaur (2022), terdapat beberapa jenis utama *deepfake porn* yang sering ditemukan dan berdampak destruktif bagi korban:

1. *Non-Consensual Deepfake Videos (Face-Swapping)*: Ini adalah jenis yang paling umum, di mana wajah korban dipetakan secara digital dan ditempelkan ke tubuh aktor porno dalam sebuah video. Hasilnya adalah konten video seksual yang terlihat seolah-olah dilakukan oleh korban secara nyata.
2. *Deepfake Image Morphing (Undressing Apps)*: Teknik ini memanipulasi foto statis (diam) menggunakan aplikasi khusus yang didukung AI untuk "menanggalkan" pakaian korban secara digital (*AI-generated nudity*). Konten ini sering kali disebar untuk tujuan pemerasan atau penghinaan karakter.
3. *Deepfake Audio (Voice Cloning)* dalam Konteks Seksual: Meskipun jarang, kloning suara digunakan untuk menciptakan rekaman audio seksual buatan (misalnya suara rintihan atau percakapan eksplisit) yang menyerupai suara korban untuk memperkuat narasi palsu dalam konten pornografi tersebut.

Fenomena ini tumbuh secara masif bukan tanpa alasan. Carpenter (2024) mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mendorong pertumbuhan *deepfake porn*:

1. Aksesibilitas Teknologi AI: Dahulu, pembuatan *deepfake* memerlukan perangkat keras canggih dan keahlian koding. Namun saat ini, munculnya aplikasi berbasis seluler yang menawarkan fitur *face-swap* otomatis atau *undressing* membuat siapa pun, bahkan tanpa keahlian teknis, dapat memproduksi konten porno palsu dalam hitungan menit (Gaur, 2022).

2. Melimpahnya Data Digital: Generasi Z merupakan kelompok yang paling rentan karena gaya hidup mereka yang sangat terbuka di media digital. Tingginya intensitas unggahan foto diri (*selfie*) di *platform* seperti Instagram dan TikTok memberikan basis data yang sangat akurat bagi algoritma AI untuk mengenali fitur wajah individu dari berbagai sudut, sehingga manipulasi yang dihasilkan menjadi sangat meyakinkan (Carpenter, 2024).
3. Rendahnya Regulasi Hukum: Pelaku *deepfake porn* sering kali berlindung di balik anonimitas internet. Gaur (2022) menyoroti bahwa perkembangan teknologi sering kali melampaui kecepatan pembuatan regulasi hukum. Banyak negara masih kesulitan mengkategorikan *deepfake porn* sebagai tindak pidana karena tidak adanya kontak fisik, meskipun dampak psikologis dan sosialnya sama beratnya dengan kekerasan seksual fisik.
4. Budaya Konsumsi Konten Digital yang Eksploitatif: Adanya permintaan pasar terhadap konten pornografi "selebriti" atau individu tertentu mendorong munculnya situs-situs khusus yang menyediakan layanan pembuatan *deepfake porn* secara pesanan (*custom deepfakes*).

Seluruh faktor pendorong di atas menunjukkan bahwa *deepfake porn* bukan sekadar masalah gangguan teknologi, melainkan sebuah serangan yang ditujukan secara spesifik berdasarkan gender. Oleh karena itu, fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari payung besar kejahatan digital yang dikenal sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (Shodiq, 2021). Secara umum, KBGO dapat dipahami sebagai segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan dengan bantuan teknologi internet, yang memiliki niat melecehkan atau menyerang seseorang berdasarkan gender atau seksualitasnya. Dalam hal KBGO, teknologi bukan hanya menjadi alat komunikasi, tetapi menjadi ruang di mana ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dipraktikkan melalui ancaman, penguntitan, hingga penyebaran konten intim tanpa izin (Shodiq, 2021).

Inti dari KBGO terletak pada adanya paksaan dan ketiadaan persetujuan (*consent*) yang merugikan korban secara emosional maupun sosial. KBGO memiliki karakteristik yang berbeda dengan kekerasan di dunia nyata, karena

dampaknya bisa menyebar sangat cepat, permanen, dan sulit dihapus dari jejak digital (Shodiq, 2021). Dalam kasus *deepfake porn*, KBGO termanifestasi melalui manipulasi tubuh perempuan yang dijadikan objek seksual untuk merendahkan martabat mereka di mata publik.

KBGO memiliki spektrum yang sangat luas, mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk merendahkan, mengendalikan, atau menyakiti korban. Salah satu studi mengkategorikan bentuk-bentuk KBGO menjadi beberapa jenis yang umum ditemui (SafeNet, 2020), antara lain:

1. *Online Sexual Harassment*: Bentuk ini mencakup pengiriman pesan, komentar, atau gambar yang tidak senonoh secara daring. Pelaku bisa saja mengirimkan konten pornografi yang tidak diminta, melontarkan komentar cabul, atau membuat lelucon seksual yang merendahkan, yang semuanya menimbulkan ketidaknyamanan dan ancaman bagi korban.
2. *Hacking & Cyberstalking*: Dalam bentuk ini, pelaku mendapatkan akses ilegal ke akun media sosial, surel, atau data pribadi korban. Tujuannya adalah untuk mengendalikan narasi digital korban, memeras, atau menyebarkan informasi pribadi. Peretasan sering kali diikuti dengan pengawasan daring, di mana pelaku melacak aktivitas daring korban, mengirimkan ancaman, atau membuat korban merasa diawasi secara konstan.
3. *Penguntitan Seksual Daring (Cyber Grooming)*: Bentuk kekerasan ini terjadi ketika pelaku, seringkali orang dewasa, membangun hubungan emosional dengan korban di bawah umur secara daring dengan tujuan mengeksploitasi mereka secara seksual. Pelaku akan memanipulasi korban, membangun kepercayaan, dan kemudian menggunakan informasi yang didapat untuk pemerasan atau pelecehan lebih lanjut.
4. *Non-Consensual Pornography*: Ini adalah salah satu bentuk KBGO yang paling merusak. Pornografi non-konsensual mencakup penyebaran foto atau video intim korban tanpa persetujuan mereka. Sering kali, konten ini digunakan sebagai alat balas dendam (*revenge porn*) setelah suatu hubungan berakhir. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, bentuk ini kini juga mencakup *deepfake porn*, di mana wajah korban ditempelkan ke konten

porno orang lain. Hal ini sangat relevan dengan penelitian Anda dan menunjukkan evolusi KBGO yang semakin canggih

Dampak dari KBGO, sebagaimana dijelaskan oleh studi berjudul Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online (Shodiq, 2021), KBGO sangatlah merusak. Korban dapat mengalami dampak psikologis yang serius, seperti trauma, kecemasan, depresi, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Secara sosial, mereka bisa mengalami isolasi, dijauhi oleh lingkungan, atau kehilangan pekerjaan karena reputasi mereka dirusak.

Melihat banyaknya bentuk dan dampak buruk dari KBGO, jelas bahwa *deepfake porn* bukan lagi sekadar persoalan teknologi, tapi sudah menjadi ancaman nyata bagi mental dan nama baik korbannya. Hal ini menjadi sangat penting untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam melihat bagaimana pemaknaan *deepfake porn* oleh perempuan Generasi Z yang sehari-harinya tidak bisa lepas dari dunia internet. Sebagai kelompok yang paling sering mengunggah konten pribadi, perempuan muda menghadapi risiko sosial yang sangat berat jika identitas mereka disalahgunakan. Oleh karena itu, setelah memahami cara kerja teknologi dan jenis-jenis kekerasannya, pembahasan selanjutnya akan fokus pada kondisi nyata dan alasan mengapa Perempuan Generasi Z menjadi korban utama dari *deepfake porn*.

2.2.2 Perempuan Gen-Z Sebagai Korban *Deepfake Porn*

Generasi Z, yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012, merupakan kelompok masyarakat yang tumbuh di era digital dengan paparan teknologi dan media sosial yang sangat tinggi. Interaksi mereka dengan *platform* digital tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, di mana konten visual, naratif, dan audio menjadi bagian dari identitas sosial mereka (Apriani & Latif, 2025). Aktivitas digital yang intens ini menghadirkan peluang sekaligus risiko, terutama bagi perempuan Gen-Z, yang sering kali mengekspresikan identitas diri melalui unggahan foto, video, maupun interaksi daring yang bersifat publik.

Kondisi tersebut menciptakan kerentanan spesifik bagi perempuan Gen-Z untuk menjadi korban manipulasi digital, termasuk *deepfake porn*. *deepfake porn* merupakan konten digital yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menempatkan wajah, suara, atau identitas seseorang ke dalam konten seksual tanpa persetujuan korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa risiko kekerasan berbasis gender telah merambah ruang digital, menjadikan media daring sebagai arena baru terjadinya eksploitatif gender (Carpenter, 2024). Perempuan Gen-Z Sebagai Korban *deepfake Porn* adalah individu perempuan yang identitas digitalnya digunakan tanpa izin dalam konten seksual yang dihasilkan oleh teknologi AI. Korban mengalami kerugian psikologis, sosial, dan reputasional meskipun secara fisik mereka tidak pernah melakukan tindakan seksual yang ditampilkan secara digital. Hal ini membuat korban tidak hanya menjadi objek manipulasi teknologi, tetapi juga mengalami dampak sosial yang nyata akibat persebaran konten tersebut (El, 2023).

Dalam studi tentang *deepfake pornography*, terutama yang didefinisikan sebagai materi pornografi yang dibuat dengan menggunakan teknologi AI untuk menempatkan wajah atau identitas seseorang pada konten seksual tanpa persetujuan mereka, proses victimisasi dapat dijabarkan ke dalam beberapa tahap yang berurutan dan saling berkaitan. Pemahaman tahapan ini penting untuk memahami bagaimana seorang perempuan Gen-Z dapat menjadi korban meskipun secara fisik ia tidak pernah mengambil atau menyetujui pembuatan konten tersebut (Schick, 2020 ; Carpenter, 2024)

1. Pengumpulan/Perolehan Materi Visual Korban

Tahap awal dalam produksi *deepfake porn* adalah pengumpulan materi visual atau audio target. Pelaku mengakses foto, video, atau rekaman suara dari korban yang tersedia secara daring, terutama yang diposting di media sosial, forum, atau layanan berbagi gambar (Carpenter, 2024). Teknologi modern memungkinkan pengambilan citra wajah dari kumpulan foto kecil sekalipun, yang kemudian digunakan sebagai “data mentah” untuk proses manipulasi lebih lanjut. Proses ini juga terjadi pada konteks non-consensual synthetic intimate imagery, di mana gambar dan video target diambil tanpa

persetujuan dan digunakan untuk pelatihan model AI yang menghasilkan konten palsu.

2. Manipulasi Menggunakan Teknologi AI

Setelah materi visual diperoleh, tahap berikutnya adalah proses manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) seperti *deepfake* yang memungkinkan pelaku untuk menyatukan wajah asli target dengan tubuh dalam konten porno yang sudah ada, atau memanipulasi konten statis menjadi video/audio montase yang tampak nyata seolah-olah korban melakukan tindakan seksual tersebut (Carpenter, 2024). Proses manipulasi ini melibatkan pelatihan model AI untuk mengenali, mengekstrak, dan mencocokkan pola visual korban dengan materi target lain. Kemajuan dalam perangkat lunak yang beredar secara publik juga makin memudahkan tahapan ini, sehingga pelaku tidak perlu kemampuan teknis tinggi untuk menghasilkan *deepfake porn*.

3. Penyebaran Konten *Deepfake*

Penyebaran dan produksi *deepfake porn* terjadi melalui mekanisme yang melibatkan teknologi, data digital, dan perilaku sosial sangat rentan untuk tersebar di ruang lingkup media digital. Perempuan Gen-Z yang aktif dalam ekosistem digital menghadapi risiko yang lebih tinggi karena interaksi mereka dengan media digital tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Dalam konteks ini, media digital berperan ganda (Straubhaar et al., 2021):

- i. Sebagai sarana penyebaran
- ii. Sebagai sumber materi visual untuk pembuatan konten *deepfake porn*.

Karakteristik ini mengubah pengguna dari posisi pasif menjadi partisipan aktif, memungkinkan mereka tidak hanya mengonsumsi tetapi juga memproduksi dan menyebarkan informasi (Straubhaar et al., 2021).

1. Eksposur Publik, Stigma, dan Dampak Sosial

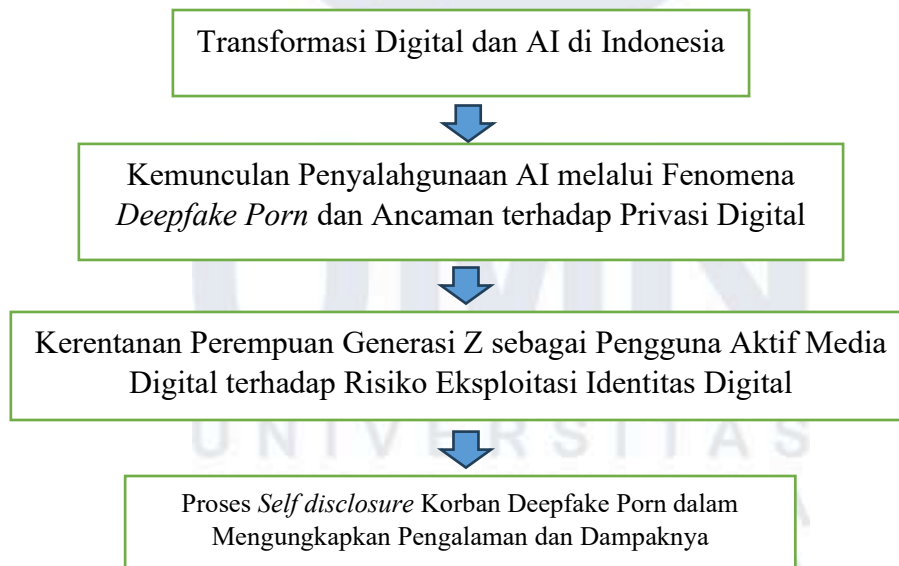
Setelah konten tersebar dan korban menyadari keberadaannya, tahap berikutnya yang sering terjadi adalah paparan publik yang lebih luas di

mana konten *deepfake* dapat dilihat, dibagikan, atau dikomentari oleh masyarakat secara umum (Gaur, 2022). Eksposur ini sering kali memicu stigma sosial, pelecehan daring, pemerasan, pelecehan berbasis gender, hingga tekanan psikologis intens terhadap korban. Korban sering mengalami kerugian reputasional, seperti asumsi publik bahwa konten tersebut adalah rekaman asli, yang kemudian memengaruhi hubungan sosial, profesional, dan psikologis mereka (Gaur, 2022). Paparan publik ini yang bisa menyebabkan potensi mengubah cara korban berkomunikasi di media sosial dan menimbulkan strategi perlindungan diri digital yang dilakukan korban. Beberapa korban yang menjadi korban *deepfake porn* mulai membatasi unggahan konten pribadi, menghapus foto lama, menonaktifkan akun, atau mengubah pengaturan privasi secara ketat untuk meminimalkan risiko manipulasi lebih lanjut, walaupun pada faktanya mereka tidak melakukan hal tersebut (Di Silvestro & Iurissevich, 2024)



2.3 Alur penelitian

Dengan fondasi konseptual yang telah ditetapkan, penelitian ini akan dilanjutkan dengan kerangka alur yang sistematis. Alur penelitian ini berfungsi sebagai peta jalan metodologis yang menggambarkan bagaimana masalah penelitian akan diuraikan dan dijawab. Penelitian ini dimulai dari fenomena penyalahgunaan *deepfake porn* di ruang digital yang berdampak pada perempuan Generasi Z sebagai korban. Pengalaman tersebut tidak hanya menimbulkan dampak psikologis dan sosial, tetapi juga mendorong korban untuk melakukan pengelolaan privasi dalam menentukan informasi yang akan dibagikan serta mempertimbangkan proses *self disclosure* kepada orang yang dipercaya. Selanjutnya, alur penelitian ini menghubungkan fenomena tersebut dengan teori *Communication Privacy Management* untuk memahami bagaimana korban menetapkan batas privasi, mengambil keputusan pengungkapan informasi, hingga membentuk pemaknaan subjektif terhadap pengalaman mereka.



Gambar 2. 1 Alur Penelitian

Sumber: Data Olahan Penelitian (2026)